

Determinan kemandirian keuangan daerah: Peran pendapatan asli daerah, *tax effort*, dan belanja modal di Jawa Tengah (2019–2023)

Dewi Dersanala
Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: dersanaladewi@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD), tax effort, and capital expenditure on the level of regional financial independence of regencies/cities in Central Java Province during 2019–2023. This study employed a quantitative approach using secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance, Statistics Indonesia, and official local government websites. The sample was selected using a total sampling technique, yielding 175 observations across 35 regencies/cities over five years. The data were analyzed using panel data regression. The stages of analysis included descriptive statistical analysis, model selection tests, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results show that PAD and tax effort have a positive, significant effect on regional financial independence. In contrast, capital expenditure has a negative and significant effect on the level of regional financial independence of regencies/cities in Central Java Province. These findings support stewardship theory, which explains that effective regional financial management can improve regional fiscal independence.

Keywords: Regional Original Revenue, Tax Effort, Capital Expenditure, Regional Financial Independence, Panel Data

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), *tax effort*, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan situs resmi pemerintah daerah. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *total sampling*, sehingga diperoleh 175 observasi yang terdiri atas 35 kabupaten/kota selama periode lima tahun. Data dianalisis menggunakan regresi data panel. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan *tax effort* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini mendukung teori *stewardship*, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah

Kata kunci: PAD, *Tax Effort*, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah, Data Panel

How to cite: Dersanala, D. (2026). Determinan kemandirian keuangan daerah: Peran pendapatan asli daerah, *tax effort*, dan belanja modal di Jawa Tengah (2019–2023). *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 6(1), 83–99. <https://doi.org/10.53088/jerps.v6i1.2200>



1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan suatu langkah penting dalam upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Konsep desentralisasi menekankan bahwa hak dan kewajiban daerah ditentukan oleh tingkat kewenangan dalam hal perencanaan, memutuskan serta mengelola kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan seberapa besar otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut (Idris, 2021). Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap era reformasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan satu bentuk dari desentralisasi kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mendekatkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat (Guntoro, 2021). Kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan. Otonomi daerah dibentuk agar setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah kemandirian keuangan daerah, yang menunjukkan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kebutuhannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat (BPK RI, 2021). Ketergantungan daerah terhadap dana transfer menunjukkan bahwa daerah tidak mampu secara mandiri membiayai kebutuhannya sendiri, melainkan harus bergantung terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Tahun 2023 rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah, dimana 68% pendapatan daerah bersumber dari suntikan dana pemerintah pusat (Theodora, 2023). Sedangkan pada tahun 2023 ke 2024, jumlah anggaran Transfer ke Daerah (TKD) meningkat dari Rp814,70 menjadi Rp857,60 triliun yang merupakan transfer tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Alokasi tersebut meningkat sebesar 3,90% dari tahun 2023. Ketergantungan tersebut menjadi tantangan besar bagi kemandirian fiskal suatu daerah.

Tingkat ketergantungan fiskal terhadap dana transfer mencapai 79,40% dari rata-rata nasional (Gianie, 2024). Hal tersebut memiliki arti bahwa pendapatan daerah 79,40% sebagian besar adalah berasal dari transfer pemerintah pusat. Berdasarkan data pada laporan keuangan APBN, bahwa besaran dana transfer ke daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Isu efisiensi anggaran semakin menjadi sorotan, terutama di tengah upaya pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan lebih bijak. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan intruksi No.1 Tahun 2025 yang menekan efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan ini mencakup pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun dengan rincian Rp256,1 triliun pada kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun pada dana transfer daerah. Kebijakan efisiensi ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, tekanan fiskal akibat pandemi covid-19, hingga dorongan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Rasyid, 2025). Daerah di Indonesia yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana

Alokasi Khusus (DAK). Kemandirian keuangan yang tinggi mencerminkan bahwa PAD yang diperoleh juga tinggi melebihi pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat. PAD yang tinggi diperoleh dengan adanya upaya pajak (*Tax Effort*) yang tinggi pula. Peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadikan suatu daerah bisa lebih leluasa mengalokasikan belanja modal untuk pembangunan, yang kemudian bisa kembali meningkatkan PAD di masa depan. Sehingga antara PAD, *tax effort* dan belanja modal, ketiga variabel tersebut saling berkaitan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah telah dilakukan beberapa kali dengan berbagai variabel yang mempengaruhinya, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), *tax effort*, belanja daerah, dan faktor ekonomi lainnya. Namun, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Banyak terjadi inkonsistensi antar hasil penelitian yang pernah dilakukan, salah satunya adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Riza & Darwis (2023). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan *tax effort* berpotensi meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Akan tetapi, terdapat juga studi yang menemukan hasil yang bertentangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Frijunita et al, 2024) dan Oktavia & Handayani (2021) yang menunjukkan bahwa *tax effort* tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Nurjanah et al, 2024) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Akan tetapi hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah & Haryanto, 2019; Nainggolan et al, 2023; Yahya & Diah, 2023) bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dibandingkan dengan PAD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh PAD, *tax effort*, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019–2023. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam pengelolaan keuangan daerah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal mereka. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada perbedaan objek dan periode penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu menggunakan obyek Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode waktu 2017–2019 (Oktavia & Handayani, 2021), maka penelitian ini mengambil obyek Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu yang lebih baru dan lebih lama, yaitu 2019–2023. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih aktual dan relevan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen PAD, *tax effort* dan belanja modal terhadap variabel dependen tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Stewardship

Teori *stewardship* merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai peran seorang manajer dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya dorongan untuk menguntungkan diri sendiri, melainkan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban yang ada. Davis et al. (1997), menjelaskan bahwa teori *stewardship* adalah teori yang menjelaskan bahwa manajer tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, tapi lebih mementingkan tujuan utama organisasi. teori ini dirancang supaya peneliti bisa memahami situasi di mana manajer bisa termotivasi untuk bekerja sebaik mungkin demi kepentingan organisasi dan pemilikinya. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya memprioritaskan kepentingan pribadi, tetapi juga menciptakan hasil yang baik bagi organisasi dan masyarakat (Sugiyanto & Musfirati, 2021). Kaitannya dengan kemandirian keuangan, pemerintah daerah yang memahami peran *stewardship*-nya akan cenderung mendorong transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangannya, karena mereka melihat bahwa hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap publik.

Desentralisasi Fiskal

Idris (2021) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan suatu daerah yang diberikan kewenangan untuk mencari dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan bagi daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat membangun tata kelola dan strategi keuangan yang baik sehingga suatu daerah dapat menjalankan dan memenuhi kebutuhannya dengan mandiri. Desentralisasi fiskal adalah salah satu cara pemerintah dalam menyalurkan dana dari APBN sebagai bagian dari kebijakan keuangan negara, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan keuangan negara dalam jangka panjang sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di masyarakat (Shara et al., 2023).

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan masyarakatnya sendiri, berdasarkan inisiatif dan aspirasi warga, yang tetap mengacu pada ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Jamal, 2023). Menurut Shara et al. (2023), otonomi daerah adalah salah satu wujud dari desentralisasi pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelaksanaan pemerintahan pada masyarakat, agar cita-cita mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bisa tercapai (Guntoro, 2021).

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Andriyan et al. (2021) menyatakan bahwa pemerintah yang memiliki tingkat kemandirian tinggi cenderung lebih mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, maka akan semakin tinggi pula niat dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam melakukan

pengungkapan LKPD kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi anggaran daerah. Kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan operasional tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Rasio ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang dihitung terhadap PAD, yaitu salah satu sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Peningkatan PAD diharapkan pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan operasionalnya secara mandiri, tanpa ketergantungan pada dana pusat. Kemandirian daerah dapat diukur berdasarkan jumlah penerimaan yang berasal dari kekayaan daerah tersebut, yang menjadi indikator tingkat kemakmuran masyarakat (Safitri, 2023).

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah untuk menjalankan otonomi daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. PAD sendiri terdiri dari: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil dari perusahaan milik daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) pendapatan sah lainnya (Republik Indonesia, 2004). Penerimaan PAD ini berasal dari wilayah daerah tersebut yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mahfudh et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Urfah (2024), menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan transfer ke daerah memiliki pengaruh negatif. Machfud et al. (2020) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Arpanai & Halmawati (2020), menemukan bahwa peningkatan PAD berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah, artinya peningkatan PAD cenderung dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah, sementara ketergantungan pada dana transfer dapat mengurangi tingkat kemandirian daerah tersebut. Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tax Effort

Tax effort merupakan suatu upaya pemerintah guna meningkatkan penerimaan daerahnya. Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja pendapatan asli daerah adalah dengan membandingkan berbagai sumber pendapatannya dengan realisasi penerimaan yang berhasil dikumpulkan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering dijadikan indikator untuk mengukur kapasitas fiskal suatu daerah, khususnya dalam menilai kemampuan daerah tersebut dalam membayar pajak (Oktavia & Handayani, 2021). Hubungan antara *tax effort* dan kemandirian keuangan cukup erat. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai pengelola (*steward*) yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola dan mengatur sumber daya

publik melalui prioritas kepentingan umum dalam hal ini adalah masyarakat (*Principal*) (Frijunita et al., 2024).

Penelitian oleh Oktavia & Handayani (2021) yang meneliti Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur melaporkan bahwa *tax effort* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Di sisi lain, penelitian oleh Riza & Darwis (2023) yang fokus pada Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa *tax effort* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah. Perbedaan hasil ini disebabkan oleh karakteristik ekonomi lokal, efektivitas pengelolaan pajak, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, hubungan antara *tax effort* dan tingkat kemandirian keuangan daerah bersifat kompleks dan dapat bervariasi antar daerah. Oleh karena itu, hipotesis mengenai pengaruh *tax effort* terhadap kemandirian keuangan daerah perlu diuji secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing daerah. pengajuan hipotesis adalah sebagai berikut:

H2: *Tax effort* berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian aset dan peningkatan nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi ambang batas kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah (Ambya, 2023). Belanja modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, belanja lainnya, serta pengadaan dalam rangka penyelenggaraan operasional Badan Layanan Umum (BLU).

Penelitian oleh Riyadi (2022) menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. penelitian oleh Oktavia & Handayani (2021) menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh alokasi belanja modal yang tidak tepat sasaran atau penurunan kualitas layanan publik yang mengakibatkan kemandirian keuangan daerah menurun. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja modal, sumber pendanaan, serta kondisi ekonomi dan sosial di masing-masing daerah. perumusan hipotesis mengenai pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah perlu dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Sehingga dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi yang diperoleh dari portal data APBD pada *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan *website* BPS Jawa Tengah untuk mencari data mengenai PDRB. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan periode waktu penelitian selama 5 tahun, mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Tahun 2019-2023, merupakan cerminan dari kebijakan desentralisasi fiskal yang semakin diperkuat Indonesia. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada periode ini, dapat mempengaruhi bagaimana suatu daerah mengelola pendapatan dan belanjanya. Sehingga pemilihan periode ini relevan untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan keuangan daerah serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang kemungkinan terjadi dalam meningkatkan kemandirian fiskal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki data laporan keuangan yang lengkap selama periode yang diteliti. Sampel diambil menggunakan teknik total *sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan keseluruhan populasi. Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Analisis yang dilakukan meliputi: uji statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji asumsi klasik, uji kebaikan model dan uji hipotesis. Persamaan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$TKKD_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 TE_{it} + \beta_3 BM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$TKKD$ = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TE = Tax Effort

BM = Belanja Modal

ε = *Error term*

i = cross section (kabupaten/kota)

t = time series (2019-2023)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai obyek yang sedang diteliti sehingga dapat memberikan informasi awal tentang masalah yang diteliti seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi (Sugiyono, 2022). Adapun pengukuran semua variabel dalam penelitian ini yaitu menggunakan satuan rasio. Hasil uji statistik deskriptif sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	<i>Tax Effort</i>	Belanja Modal
<i>Mean</i>	19,41	108,87	0,39	13,51
<i>Median</i>	17,39	107,12	0,37	12,91
<i>Maximum</i>	52,97	174,65	0,86	27,33
<i>Minimum</i>	10,48	69,43	0,01	5,31
<i>Std.Dev</i>	7,30	18,05	0,17	4,13
<i>Observations</i>	175	175	175	175

Mean merupakan nilai rata-rata dari seluruh data pada satu variabel. Nilai ini menunjukkan seberapa besar rata-rata responden atau objek penelitian terhadap variabel tersebut. Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 19,41 secara umum tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah, artinya sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. PAD memiliki rata-rata sebesar 108,87 yang menunjukkan bahwa kinerja PAD relatif baik, namun masih terdapat perbedaan antar daerah. *Tax effort* dengan nilai rata-rata 0,39 menunjukkan bahwa upaya pajak pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan. Belanja modal dengan nilai rata-rata 13,51 menunjukkan bahwa proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah relatif kecil, karena sebagian besar anggaran masih digunakan untuk belanja rutin.

Maximum merupakan nilai terbesar dari seluruh variabel penelitian. Nilai *maximum* 52,97 menandakan ada daerah dengan tingkat kemandirian yang cukup tinggi. PAD dengan nilai *maximum* sebesar 174,65 mengindikasikan daerah dengan potensi PAD tinggi. *Tax effort* dengan nilai *maximum* 0,86 berarti ada daerah yang hampir mencapai potensi pajak maksimal. Nilai *maximum* belanja daerah sebesar 27,33 menunjukkan daerah dengan alokasi belanja modal tinggi.

Minimum merupakan nilai terkecil dari seluruh variabel penelitian. Nilai *minimum* sebesar 10,48 menunjukkan bahwa terdapat daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Nilai *minimum* sebesar 69,43 menunjukkan bahwa masih terdapat daerah dengan kemampuan PAD yang rendah. Nilai *minimum* 0,01 menunjukkan ada daerah yang hampir tidak menggali potensi pajaknya. Belanja modal dengan nilai *minimum* sebesar 5,31 menunjukkan daerah yang masih rendah dalam pengeluaran untuk aset tetapnya.

Standard deviation merupakan ukuran seberapa besar variasi atau penyebaran data dari rata-rata (mean). Nilai ini menunjukkan tingkat konsistensi atau keragaman data yang diperoleh. Apabila *Standard deviation* kecil maka data yang diperoleh relatif seragam, sedangkan apabila *Standard deviation* besar maka data yang diperoleh bervariasi. Nilai *Standard deviation* pada tingkat kemandirian adalah 7,30 menunjukkan variasi sedang, yang artinya tingkat kemandirian antar daerah tidak terlalu seragam. Nilai *Standard deviation* 18,05 menunjukkan bahwa keragaman PAD antar daerah cukup besar, hal tersebut mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah tersebut. Nilai *Standard deviation* 0,17 menunjukkan bahwa variasi cukup tinggi dalam kemampuan daerah mengoptimalkan pajak. Nilai *Standard deviation* 4,13

menunjukkan variasi sedang, yang artinya perbedaan alokasi belanja modal antar daerah tidak terlalu ekstrem.

Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model dilakukan untuk mengetahui model statistik mana yang akan digunakan dalam metode analisis pada penelitian ini, baik itu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) maupun *Random Effect Model* (REM). Untuk mengetahui model tersebut maka data perlu melewati uji sebagai berikut:

Uji chow dilakukan untuk mengetahui apakah model analisis yang digunakan adalah model CEM atau FEM. Hasil uji chow pada Tabel 2, menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa model yang terpilih adalah model FEM.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	46,95	(34,13)	0,00
<i>Cross-section Chi-square</i>	444,13	34	0,00

Uji *hausman* digunakan untuk mengetahui model mana yang lebih baik digunakan dalam analisis. Model ini bertujuan untuk menentukan apakah analisis lebih baik dilakukan dengan model FEM atau REM. Hasil uji *hausman* pada Tabel 3 menunjukkan nilai probabilitasnya sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut memiliki arti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model FEM. Hasil uji *chow* dan uji *hausman* menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah model FEM, sehingga penelitian ini menggunakan model FEM sebagai metode analisis data.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	22,86	3	0,00

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai salah satu syarat uji kuantitatif yang harus dilakukan. Dalam data panel, uji asumsi klasik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan teori (Ghozali, 2021).

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	22,86	3	0,00

Hasil uji normalitas pada Tabel 4 menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 0,05 ($>0,05$), maka residual dianggap normal. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,07 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tersebut berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	Pendapatan Asli Daerah	<i>Tax Effort</i>	Belanja Modal
Pendapatan Asli Daerah	1,00	-0,00	0,00
<i>Tax Effort</i>	-0,00	1,00	0,15
Belanja Modal	0,00	0,15	1,00

Pada Tabel 5 terlihat bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada masing-masing variabel independen yaitu PAD, *tax effort* dan belanja modal karena nilai koefisien korelasi variabel independen berada kurang dari 0,80 (<0,80).

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	Galat Standar	t-hitung	Prob.
Konstanta	1,07	0,89	1,19	0,23
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,59	0,55
<i>Tax Effort</i>	-0,71	0,99	-0,71	0,47
Belanja Modal	-0,00	0,02	-0,00	0,99

Pada Tabel 6, variabel independen yaitu PAD dengan nilai probabilitas 0,55, *tax effort* dengan nilai probabilitas 0,47 dan belanja modal dengan nilai probabilitas 0,99. Dapat diartikan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki nilai probabilitas di atas tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada tiga variabel tersebut.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Weighted Statistics</i>	
Durbin-Watson stat	1,93

Nilai *durbin watson* (DW) pada Tabel 7 sebesar 1,93. Berdasarkan teori Ghazali (2021), syarat uji autokorelasi adalah jika nilai DW > -2 dan < 2 maka tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan syarat tersebut, nilai DW sebesar 1,93 > -2 dan 1,93 < 2. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Galat Standar	t-hitung	Prob.
Konstanta	12,94	1,59	8,09	0,00
Pendapatan Asli Daerah	0,05	0,01	4,64	0,00
<i>Tax Effort</i>	7,65	1,77	4,31	0,00
Belanja Modal	-0,18	0,05	-3,47	0,00
<i>R-squared</i>	0,87			
<i>Adjusted R-squared</i>	0,84			
<i>F-statistic</i>	76,60			
<i>Prob (F-statistic)</i>	0,00			

Tabel 8 menunjukkan nilai *coefficient* sebesar 12,94, ini menjelaskan apabila PAD, *tax effort* dan belanja modal tidak mengalami perubahan atau memiliki nilai 0, maka rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 12,94. Nilai *coefficient* PAD sebesar 0,05 artinya jika PAD naik 1% maka tingkat kemandirian keuangan daerah naik sebesar 0,05 dengan asumsi bahwa *tax effort* dan belanja modal konstan. *Tax effort* memiliki nilai *coefficient* sebesar 7,65 dapat diinterpretasikan apabila *tax effort* naik 1 satuan maka tingkat kemandirian keuangan daerah turun 7,65 dengan anggapan PAD dan belanja modal tidak berubah. Interpretasi belanja modal yang memiliki nilai koefisien -0,18 yaitu ketika belanja modal naik 1% maka tingkat kemandirian keuangan daerah turun sebesar -0,18 dengan asumsi PAD dan *tax effort* konstan.

Uji F dan Koefisien Determinasi

Bersarkan Tabel 8 nilai probabilitas F sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, dapat diartikan bahwa model regresi layak digunakan. sehingga secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen PAD, *tax effort* dan belanja modal berpengaruh terhadap variabel dependen tingkat kemandirian keuangan daerah. Selain itu nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,84 menunjukkan bahwa sebesar 84% variasi dalam tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam model penelitian, yaitu PAD, *tax effort*, dan belanja modal. Sisanya sebesar 16% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi ini.

Uji Hipotesis

Berdasarkan Tabel 8, nilai probabilitas semua variabel adalah kurang dari 0,05. PAD dengan nilai probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi 0,05 sehingga H1 terdukung. Hal ini diartikan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Tax effort* dengan nilai probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi 7,65 sehingga H2 terdukung. Hal tersebut dapat diartikan bahwa *tax effort* berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal dengan nilai probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi -0,18 sehingga H3 tidak terdukung. sehingga dapat diartikan bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun, dikarenakan pada variabel belanja modal nilai koefisien berkorelasi negatif, maka dari hasil penelitian tersebut belanja modal berpengaruh ke arah negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sehingga H3 tidak terdukung.

4.2. Pembahasan

PAD dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, PAD memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yang artinya H₁ terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship pada penelitian Arethusa & Terawati (2025), yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai pengelola (*steward*) bertanggungjawab untuk mengelola penerimaan PAD sebagai bentuk peningkatan pelayanan umum terhadap masyarakat melalui pengalokasian dana guna meningkatkan kemandirian daerah. Berdasarkan data penelitian, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kemampuan memperoleh PAD sangat baik dan melebihi alokasi yang dianggarkan sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah adalah Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Banjarnegara, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Salatiga.

Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep dasar otonomi daerah, di mana salah satu indikator keberhasilan desentralisasi fiskal adalah kemampuan daerah dalam membiayai

sendiri aktivitas pemerintahan dan pembangunannya melalui sumber pendapatan asli daerah, tanpa bergantung secara berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketika PAD meningkat, pemerintah daerah sebagai steward memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai belanja rutin maupun belanja pembangunan, tanpa terlalu bergantung pada dana perimbangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizah (2022), Nainggolan et al. (2023), Yahya & Diah (2023) dan Fauziah & Haryanto (2019). Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan temuan Riza & Darwis (2023) dan Kusmila (2023), yang menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tax Effort dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel *tax effort* berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, yang artinya H_2 terdukung. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara statistik, peningkatan *tax effort* akan berkontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* pada penelitian Mustiani et al. (2022), yang menjelaskan bahwa teori *stewardship* tidak lepas dari bagaimana pemerintah atau pemimpin dapat mengendalikan dan mengarahkan suatu kegiatan dalam wilayah atau daerah kekuasaannya untuk mencapai tujuan organisasi dan memuaskan masyarakat atas kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian 2019-2023, sudah cukup efektif dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui *tax effort*, diantaranya adalah Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Tegal. Namun kabupaten/kota lainnya belum efektif dalam memaksimalkan upaya pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kemampuan lebih tinggi dalam menggali potensi pajak daerahnya melalui optimalisasi pajak, cenderung memiliki kemandirian keuangan yang lebih baik. *Tax effort* yang tinggi mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan pajak berdasarkan potensi ekonomi yang tersedia. Semakin optimal *tax effort*, maka daerah dapat meningkatkan PAD dan secara langsung mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Muhammad (2021) dan Riza & Darwis (2023), yang menyatakan bahwa peningkatan PAD terjadi karena adanya keterkaitan langsung antara upaya pajak dengan PAD, dimana pajak daerah merupakan sumber utama dari PAD. Oleh karena itu, kebijakan daerah yang berfokus pada reformasi sistem perpajakan, peningkatan basis pajak, serta penguatan kapasitas aparaturnya menjadi strategi penting dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2024) dan Nailulmuna (2024). Akan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Handayani (2021), yang menyatakan bahwa *tax effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah karena dalam kurun waktu penelitian terjadi penurunan rasio *tax effort* secara terus menerus sehingga mengakibatkan turunnya ekonomi global dan daya beli masyarakat.

Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Variabel belanja modal menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, yang artinya H_3 tidak terdukung. Secara statistik, peningkatan alokasi belanja modal justru berkaitan dengan penurunan tingkat kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan teori *stewardship* oleh penelitian Abbas et al. (2020), dijelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pengelola (*steward*) dapat dipercaya untuk mengambil dan memprioritaskan kepentingan umum melalui tanggungjawab keuangan yang diamanatkan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan belanja daerah dengan jujur, efektif dan efisien.

Berdasarkan data hasil penelitian, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan sebagian besar belanjanya untuk belanja modal sebagai peningkatan pembangunan jangka panjang dan hanya beberapa kabupaten saja yang tidak mengalokasikan belanja modalnya. Diantaranya adalah Kabupaten Klaten, Pemalang dan Purbalingga. Namun, hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama periode penelitian yaitu 2019-2023 belum mampu memberikan efek langsung terhadap peningkatan PAD atau kemandirian fiskal. Meskipun secara teori belanja modal seharusnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan PAD. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah cenderung belum diarahkan secara strategis untuk mendukung basis penerimaan daerah secara langsung. Hal ini dapat disebabkan oleh alokasi belanja modal yang lebih bersifat pemborosan, kurang merata, atau tidak didukung oleh perencanaan yang matang.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti Handayani & Erinis (2020) dan Oktavia & Handayani (2021), yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif disebabkan karena belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan serta pemanfaatan belanja modal yang kurang efektif. Namun penelitian Bella et al. (2022), menemukan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frijunita et al. (2024) dan Yahya & Diah (2023), menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Belanja modal seharusnya diarahkan untuk pengadaan aset daerah yang memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun, serta difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas layanan publik. Namun dalam praktiknya, alokasi belanja modal cenderung digunakan untuk kegiatan yang bersifat pemborosan atau berisiko tinggi, sehingga memberikan dampak negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, meskipun belanja modal merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa belanja tersebut diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mendukung peningkatan PAD dan kemandirian fiskal secara berkelanjutan seperti sektor perdagangan melalui revitalisasi pasar, sektor pertanian melalui pembangunan saluran irigasi, sektor UMKM melalui kegiatan pelatihan dan lain sebagainya.

5. Kesimpulan

PAD dan *tax effort* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 yang artinya H_1 dan H_2 terdukung. Artinya, apabila PAD dan *tax effort* meningkat maka berpotensi meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 yang artinya H_3 tidak terdukung. Artinya, semakin besar belanja modal yang dikeluarkan maka dapat menurunkan kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa mendatang. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, padahal faktor-faktor lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan masyarakat (IPM) dan pendapatan per kapita juga memiliki pengaruh. Selain itu, data mengenai perhitungan rasio pada variabel independen diperoleh dari perhitungan manual yang dapat menyebabkan bias pada penelitian. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan strategi dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD, *tax effort* dan belanja modal agar kemandirian keuangan daerah dapat meningkat. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih fokus pada identifikasi faktor spesifik yang menyebabkan daerah tidak dapat memaksimalkan PADnya dan memperluas variabel penelitian.

Referensi

- Abbas, D. S., Eksandy, A., Hidayat, I., & Larasati, N. (2020). Modal Belanja Provinsi Bantul Terbaik Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Keuangan: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 154–168. <https://doi.org/10.37403/keuangan.v6i2.146>
- Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). AURA Publishing.
- Andriyan, T., Bustami, E., & Mualim, B. (2021). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkatan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, 3(7), 44–54. <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/472/258>
- Arethusa, T. A., & Terawati, M. T. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 616–632. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.209>
- Arpanai, W. N., & Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 2(1), 2373–2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
- Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. (2022). Pengaruh Pendaapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(03), 405–413. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i3.522>

- BPK RI. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020)*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2020/lkpp_2020_1624341245.pdf
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *JSTOR: The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Faizah, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemandirian Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020). *Skripsi*. Universitas Tidar. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11860
- Fauziah, A. N. A., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Frijunita, S., Gurendrawati, E., & Utamingtyas, T. H. (2024). Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 236-247. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.02>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (A. H. S, Ed.; 10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gianie. (2024). Otonomi Daerah: Ketergantungan terhadap Transfer dari Pusat Masih Tinggi. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/artikel/otonomi-daerah-ketergantungan-terhadap-transfer-dari-pusat-masih-tinggi>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Jurnal UNTAG*, 3(2). <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Handayani, T. U., & Erinoss. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216>
- Idris, P. M. (2021). Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)*, 1(11). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.237>
- Jamal, F. (2023). Problematika Otonomi Daerah dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah. *Pamulang Law Review*, 6(2), 161–168. <https://doi.org/10.32493/palrev.v6i2.35446>
- Kusmila, Z. (2023). Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 9226–9234. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7800>
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14-31. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>

- Mahfudh, Saleh, H., & Saleh, M. Y. (2022). *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah* (M. Ruslan & S. Suriani, Eds.). Pusaka Almaida.
- Muhammad, N. F. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan, PDRB Per Kapita, Tax Effort, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2), 2011–2017. <https://doi.org/10.14710/djoe.31596>
- Mustiani, I., Effendy, L., & Nurabiah. (2022). Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis (Jurnal Ekombis)*, 10, 403–418. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1>
- Nailulmuna. (2024). *Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Tax Effort Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Kendal Tahun 2012-2022)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/26298>
- Nainggolan, A., Sidauruk, T. D., & Tito, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.54964/liabilitas/https>
- Nurjanah, R., Triantoro, A., & Hardiana, R. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jawa Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Fineteach: Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 3(3), 268-278. <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach/article/view/77121>
- Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3842/3853>
- Rasyid, R. (2025). Menuju Kemandirian Fiskal: Strategi Optimalisasi Pajak di Provinsi Jawa Tengah. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/4132240256bitha/menuju-kemandirian-fiskal-strategi-optimalisasi-pajak-di-provinsi-jawa-tengah-24SGoJJb9YX>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. LN. 2004/ No. 126, TLN NO.4438, LL SETNEG : 44 HLM.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Tahun*, 3(1). <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2143>
- Riza, & Darwis, Z. (2023). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pad Dan Tax Effort Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kota Bukittinggi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1961–1973. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1508>
- Safitri, I. M. (2023). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Lkpd Kabupaten / Kota Di*

- Provinsi Jawa Tengah* 2016-2020).
http://etheses.uingusdur.ac.id/4962/2/4317016_FULL%20TEXT.pdf.pdf
- Setiawan, C. (2024). Pengaruh Tax Effort, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2021. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77887>
- Shara, N. K., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389/http>
- Sugiyanto, H., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan*, 5(1), 20–26. <https://doi.org/10.35837/subs.v5i1.1382>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-19). Alfabeta.
- Theodora, A. (2023). 68 Persen Pendapatan Daerah Masih Digelontor Pusat. *Kompas.Id*. https://www.kompas.id/artikel/dua-dekade-desentralisasi-daerah-belum-sepenuhnya-mandiri-fiskal?status=sukses_login&login=1743087376575&open_from=header_button&loc=header_button
- Urfah, S. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus SIKD Kota Batu Tahun 2014-2023)*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/67228>
- Yahya, M., & Diah, W. T. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar. *ETNIK: Jurnal Ekonomi - Teknik*, 2(4), 317–325.
<https://doi.org/10.54543/etnik.v2i4.177>